

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya.
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud Silalahi, 2018, *Lahirnya hukum lingkungan*, Yayasan Lawencon, Bandung.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

### C. Skripsi

Agustin, 2020, “Pengawasan Izin Praktik Akupuntur Terapis Di Kota Padang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

### D. Jurnal

Al Sentot Sudarwanto Dan Dona Budi Kharisma, “*Omnibus Law* Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2, April-Juni 2018.

Anih Sri Suryani, “Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Volume XII Nomor 20, Oktober 2020.

Agnes Ruth Febianti, “Relaksasi Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Bisnis”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3 Nomor 11, November 2022.

Busroh FF, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Jurnal Arena Hukum*. Volume 10 Nomor 2, Tahun 2017.

Dwi Febriyanti, *et al.*, “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 3 Nomor 2, September 2021.

Evan Devara, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2021.

Fitri Yani Dewi Siregar, “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Universitas Medan Area*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2020.

Hari Agus Santoso, “Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi”, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2021.

Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2021.

Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 1 Agustus 2011.

Ismah Naqiyyah dan Ghunarsa Sujatnika, “Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 Dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume IX Nomor 1, Mei 2023.

Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak, “Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 Nomor 1, Tahun 2021.

Kristianto Pustaka Halomoana, “Tantangan Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Dan Pasca Pandemi Covid 2019”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2021.

M Reza Baihaki, “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Volume 51 Nomor 1, Tahun 2021.

Muhamad Bilal, *et al.*, “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam *Omnibus Law* Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Volume 4 Nomor 2, September 2021.

R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Volume XIII Nomor 01, Tahun 2015.



Riyatno Harsasto, “Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2020.

Roni Sulistyanto Luhukay, “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2021.

Sabda Sarah Bunda Medellu dan Stephanie Elisandra Lorin Ledo, “Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2021.

Zulkifli Lahabu, Risno Mina, Abdul Ukas Marzuki, Dri Sucipto, “Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 6 Nomor 1, April 2022.

#### **E. Internet**

DPR RI, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, versi Februari 2020, melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf>, diakses pada 8 Agustus 2023, Pukul 12.32.

FKM UI, Naskah Sesi AMDAL, melalui <https://ocw.ui.ac.id>, diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 14.15.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 20 Mei 2023, Pukul 19.33.

Mahkamah Konstitusi, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja  
Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, melalui  
<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>>, diakses  
pada 8 Agustus 2023 Pukul 10.19.

